

BONUS DEMOGRAFI SEBAGAI PELUANG DAN TANTANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI ERA OTONOMI DAERAH

Muhammad Agus Umar

Universitas Bumi Hijrah Maluku Utara
Jl. Raya Soififi, Kota Tidore Kepulauan, Email : muhagus197@gmail.com

Abstrak : Indonesia diprediksikan pada tahun 2020 hingga 2030 nanti akan memperoleh bonus demografi. Bonus demografi yang dimaksud yaitu ketika negara Indonesia memiliki jumlah penduduk usia muda dengan jumlah yang melimpah, yaitu sekitar 2/3 dari jumlah penduduk keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bonus demografi dan kondisi penduduk usia produktif di Indonesia serta menganalisis peluang dan tantangan pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam di daerahnya. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan data studi pustaka. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang bonus demografi penduduk usia muda berkisar antara 170,9 sampai 187,6 juta jiwa pada tahun 2020 sampai 2030. Bonus demografi ini bisa dijadikan sebagai peluang bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerahnya, tetapi juga merupakan sebuah tantangan jika laju pertumbuhan penduduk tidak diikuti dengan kebijakan strategis dalam meningkatkan sumber daya manusia dan penyediaan lapangan kerja yang produktif dan memadai.

Kata Kunci : Bonus demografi, Sumber Daya Alam, Otonomi Daerah

PENDAHULUAN

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 dalam *The 2015 Revision of World Population Prospects* melaporkan populasi dunia diperkirakan akan mencapai 8,5 miliar pada tahun 2030, kemudian akan meningkat menjadi 9,7 miliar pada tahun 2050, dan melampaui 11 miliar pada tahun 2100. India yang diperkirakan akan melampaui Tiongkok, sebagai negara berpenduduk paling padat, sekitar tujuh tahun dari sekarang, dan Nigeria akan melampaui Amerika Serikat untuk menjadi negara terbesar ketiga di dunia dalam 35 tahun dari sekarang.

Saat ini, Tiongkok dan India tetap merupakan dua negara dengan tingkat populasi terbesar di dunia, masing-masing dengan jumlah penduduk lebih dari 1 miliar orang,

mewakili 19 dan 18 % dari populasi dunia. Di antara sepuluh negara dengan kesuburan terbesar di dunia saat ini, salah satunya berada di Afrika (Nigeria), lima negara berada di Asia (Bangladesh, Tiongkok, India, Indonesia, dan Pakistan), dua negara berada di Amerika Latin (Brasil dan Meksiko), satu di Amerika Utara (AS), dan satu di Eropa (Federasi Rusia). Masuknya Indonesia dalam kategori negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk terbesar di dunia sangat berkaitan dengan istilah bonus demografi yang puncaknya diperkirakan terjadi pada tahun 2020 sampai 2030.

Di tengah mengemukanya isu bonus demografi, dunia masih dihadapkan pada masalah tingginya jumlah pengangguran usia muda (15-30 tahun). Bahkan, di tengah perbaikan ekonomi negara maju tahun 2007,

ternyata tidak memberikan dampak pada penciptaan kesempatan bagu angkatan kerja muda. Kondisi ini terlihat dari besarnya tingkat pengangguran usia muda di dunia sebesar 12,6 % di tahun 2013 (*Global Employment for Youth, 2013*).

Para ahli demografi memprediksikan pada tahun 2020 hingga 2030 nanti, Indonesia akan dihadaahi Bonus Demografi. Bonus Demografi yang dimaksud yaitu ketika negara Indonesia memiliki jumlah penduduk usia muda/produktif dengan jumlah yang melimpah, yaitu sekitar 2/3 dari jumlah penduduk keseluruhan. Bonus demografi dapat dilihat dengan parameter *Dependency Ratio* (angka beban ketergantungan) yang cukup rendah, yaitu mencapai 44.

Hal ini berarti bahwa dalam setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) hanya menanggung sekitar 44 penduduk tidak produktif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) indonesia tahun 2010 menunjukkan *Dependency ratio* Indonesia sebesar 50,5. Sementara pada tahun 2015 *dependency ratio* memiliki angka lebih kecil yaitu 48,6. Angka *dependency ratio* ini akan semakin kecil lagi pada tahun 2020 hingga 2030, yang akan menciptakan bonus demografi untuk Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menggantungkan sumber pendapatan negara dari sektor pengelolaan sumber daya alam. Sektor ini menempati urutan kedua setelah sektor pajak. Pada tahun 2015, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2015 tercatat sebesar Rp252,4 triliun, atau 93,8

persen dari target APBN-P 2015 yang sebesar Rp269,1 triliun. Lebih rendahnya realisasi PNBP ini terutama disebabkan oleh turunnya pendapatan sumber daya alam (SDA) migas dan pertambangan mineral dan batubara (minerba), karena turunnya harga komoditas batubara di pasar internasional (Kemenkeu, 2015).

Menurunnya harga komoditi sumber daya alam seperti minyak bumi dan bahan tambang mineral yang terjadi saat ini sangat berdampak pada sektor ketenagakerjaan. Kondisi ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran di tengah melonjaknya jumlah penduduk dan menyempitnya kesempatan kerja bagi penduduk usia kerja. Berbagai studi mengenai dampak pengangguran usia muda telah dilakukan sejak 30 tahun terakhir. Thornberry dan Christenson (1984) mengemukakan meningkatnya pengangguran usia muda akan meningkatkan kriminalitas dan perilaku antisosial di dalam masyarakat. Selanjutnya, Platt (1984) menambahkan bahwa dalam jangka panjang, risiko bunuh diri juga meningkat sejalan dengan tidak terserapnya angkatan kerja muda di pasar kerja.

Jumlah penduduk yang terus meningkat dan cadangan sumber daya alam yang semakin menipis menjadi permasalahan serius bagi dunia dan Indonesia. Kebijakan strategis dan spesifik sangat dibutuhkan bagi kaum muda sehingga pasar kerja mampu menyerap sesuai dengan dinamika struktur penduduk, khususnya dalam menghadapi ledakan penduduk usia kerja yang telah dimulai sejak tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk

memberikan gambaran tentang bonus demografi dan kondisi penduduk usia produktif di Indonesia serta menganalisis peluang dan tantangan pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam di daerahnya.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur. Literatur dan informasi yang berhubungan dengan bonus demografi dikumpulkan kemudian dilakukan analisis secara deskriptif. Data-data yang berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, tingkat pengangguran dan tenaga kerja di Indonesia digeneralisir, dihubungkan dengan peluang dan tantangan dalam pemanfaatan sumber daya alam di daerah pasca diberlakukannya Otonomi Daerah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. BONUS DEMOGRAFI DAN TREND PENGANGGURAN USIA MUDA

Bonus demografi merupakan suatu istilah dalam ilmu kependudukan (demografi), baik ilmu demografi murni (pure demografi) maupun kajian kependudukan (population study). Dalam berbagai seminar dan diskusi, istilah bonus demografi selalu dikaitkan dengan angka ketergantungan (Dependency

Ratio). Angka ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia

produktif (15-64 tahun) dengan non produktif (di luar usia 15-64 tahun) dikalikan 100. Yang dimaksud usia non produktif adalah anak di bawah usia 15 tahun dan lansia di atas 64 tahun. Angka ketergantungan menggambarkan berapa banyak orang usia non produktif yang hidupnya harus ditanggung oleh kelompok usia produktif. Sebagai contoh misalnya angka ketergantungan Indonesia tahun 2010 adalah sekitar 52. Artinya bahwa setiap 100 penduduk usia produktif di Indonesia menanggung sekitar 52 penduduk usia non produktif.

Angka ketergantungan Indonesia terus menurun. Berdasarkan data BPS, tahun 1971 sebesar 86, tahun 2000 menjadi 54 dan 2010 sebesar 52. Penurunan angka ketergantungan ini akan terus terjadi karena semakin meningkatnya jumlah penduduk usia produktif yang diperkirakan sampai pada tahun 2030. Menurut Dr Sukamdi, peneliti di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM), bonus demografi yang akan diterima Indonesia tahun 2020 sangat menguntungkan. Pada kondisi bonus demografi masyarakat akan memperoleh pendapatan lebih tinggi dengan dana tabungan lebih banyak. Pada fase bonus demografi tingkat ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk tidak produktif kepada penduduk produktif cenderung rendah (Kurniawan; dalam Detiknews [online], 2014).

Tabel.1 Dependency Ratio menurut Provinsi, 2010-2035

Provinsi	Tahun					
	2010	2015	2020	2025	2030	2035
Aceh	56,3	54,8	53,6	50,8	47,9	45,8
Sumatera Utara	58,0	56,3	55,3	53,6	51,7	50,8
Sumatera Barat	57,7	55,8	54,8	53,6	51,7	50,6
Riau	54,1	51,5	49,7	48,4	47,1	46,6
Jambi	50,8	47,3	44,5	43,3	42,7	42,7
Sumatera Selatan	51,3	49,7	48,4	47,3	45,8	45,3
Bengkulu	51,3	47,9	46,2	44,9	44,3	44,5
Lampung	51,1	49,5	48,6	47,3	45,6	45,3
Kepulauan Bangka Belitung	48,6	46,2	44,9	44,3	43,3	43,1
Kepulauan Riau	46,8	49,7	46,4	41,8	38,1	37,9
DKI Jakarta	37,4	39,9	42,0	42,2	40,1	39,5
Jawa Barat	49,9	47,7	46,4	46,4	46,2	46,6
Jawa Tengah	49,9	48,1	47,7	48,4	49,9	51,7
DI Yogyakarta	45,8	44,9	45,6	46,8	47,7	48,4
Jawa Timur	46,2	44,3	43,9	44,3	46,2	48,4
Banten	48,6	46,4	45,3	43,9	41,8	41,0
Bali	47,3	45,6	43,3	42,2	43,3	45,8
Nusa Tenggara Barat	55,8	53,8	52,2	50,2	48,6	48,1
Nusa Tenggara Timur	70,6	66,7	63,4	62,1	61,6	61,6
Kalimantan Barat	52,7	50,8	49,7	48,8	47,3	46,6
Kalimantan Tengah	50,4	46,2	43,3	41,4	40,3	39,9
Kalimantan Selatan	49,3	48,6	47,7	46,2	44,7	44,7
Kalimantan Timur	48,6	46,2	44,5	43,7	43,1	43,5
Sulawesi Utara	47,9	46,6	46,4	46,8	47,3	48,4
Sulawesi Tengah	52,7	50,6	49,7	49,5	48,6	48,6
Sulawesi Selatan	56,0	52,9	51,3	50,4	49,5	49,7
Sulawesi Tenggara	63,4	60,5	58,0	54,6	52,7	51,5
Gorontalo	51,7	48,6	47,5	47,7	47,7	47,9
Sulawesi Barat	60,5	56,0	53,8	52,7	51,5	51,1
Maluku	63,1	59,7	58,2	57,5	55,8	54,3
Maluku Utara	61,3	58,5	56,0	53,4	51,5	50,8
Papua Barat	53,6	49,9	47,1	45,3	44,3	43,7
Papua	53,8	47,5	43,7	42,0	41,6	42,2
INDONESIA	50,5	48,6	47,7	47,2	46,9	47,3

Sumber: BPS Indonesia, 2015

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi yang dilakukan oleh BPS dan UNDP, jumlah penduduk usia kerja Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan mencapai sekitar 170,9 juta jiwa dan akan meningkat lagi menjadi 187,6 juta jiwa pada tahun 2025. Hal tersebut mempunyai

konsekuensi pada pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penyediaan lapangan kerja produktif bagi penduduk usia kerja ini. Jika hal ini bisa dilakukan maka besarnya penduduk usia kerja (bonus demografi) akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi

yang sangat potensial dan mampu bersaing di pasar global. Sebaliknya jika tidak ada kebijakan yang berpihak pada penyerapan tenaga kerja, maka sangat mungkin jumlah pengangguran

usia kerja akan terus bertambah dan berdampak pada situasi sosial ekonomi di masyarakat.

Tabel 2. Presentase Pengangguran Usia Muda di Indonesia Tahun 2011-2014

Jenis Kelamin/Daerah	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Laki-Laki	22.81	19.49	21.23	21.72
Perempuan	23.79	19.82	22.12	22.94
Perkotaan	25.68	22.54	23.41	24.24
Pedesaan	19.83	16.74	19.75	20.08
Total	22.81	19.62	21.58	22.2

Sumber : Sakrenas, 2011-2014

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2014, dalam kurun waktu tahun 2011 sampai 2014, jumlah pengangguran usia muda di Indonesia mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2012, jumlah pengangguran usia muda di Indonesia mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 19.62 %. Penurunan jumlah pengangguran usia muda ini disebabkan oleh bertambahnya pekerja paruh waktu di Indonesia. Dalam periode 2010-2012, terdapat 3,6 % kenaikan pekerja muda Indonesia yang bekerja secara paruh waktu (kurang dari 35 jam per minggu).

Kondisi ini ternyata tidak bertahan lama karena setelah tahun 2012, jumlah pengangguran usia muda kembali mengalami kenaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2014 hanya turun 0,12% menjadi 5,70% dari periode yang sama

tahun sebelumnya 5,82%. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2014 mencapai 125,3 juta orang, atau bertambah 1,7 juta orang dari Februari 2013. Sementara jumlah penduduk yang bekerja mencapai 118,2 juta orang, atau bertambah 1,7 juta orang dari Februari 2013. Sejak lima tahun lalu, capaian TPT pada periode Februari terus mencatatkan tren melambat. Misalnya, pada Februari 2011, TPT tercatat turun 0,61%. Kemudian, TPT Februari 2012 turun 0,48%, lalu TPT Februari 2013 turun 0,50% menjadi 5,92%.

Data pada tabel 2 juga menunjukkan peningkatan jumlah pengangguran berdasarkan wilayah (desa dan kota). Migrasi penduduk menjadi salah satu faktor pendorong tingginya angka pengangguran. Pada tahun 1990-an, kaum muda di Indonesia khususnya kelompok etnis Minang hampir setengahnya tinggal di perkotaan dan bekerja di perkotaan. Trend ini kemudian berkembang pada tahun 2000 ditandai dengan munculnya etnis lain seperti Bugis dan

Sunda, yang mulai melakukan migrasi ke kota dengan presentase kaum muda yang tinggal di perkotaan sebesar 67,7% dan 46,9% (ILO,2004).

Selain itu, sektor pertanian yang menjadi andalan di pedesaan kian tidak diminati oleh penduduk usia muda di desa. Moderensisasi dan industrialisasi pedesaan menyebabkan masyarakat di desa cenderung memiliki pandangan tentang ukuran keberhasilan seseorang adalah mendapatkan pekerjaan formal dan tinggal di daerah perkotaan. Sejalan dengan itu menurut Hall dkk, (2011) mengemukakan bahwa banyak petani di pedesaan sendiri memiliki minat untuk keluar dari sektor pekerjaan tersebut dan berharap bahwa anak petani tidak harus bekerja di pertanian sama seperti orang tuanya. Hal ini justru akan sangat mempengaruhi produktivitas hasil pertanian di desa karena berkurangnya tenaga kerja. Krisis sosial juga berpotensi dialami kaum muda yang bermigrasi ke kota dan kalah berkompetisi dengan pesaingnya di kota.

B. PELUANG DAN TANTANGAN BONUS DEMOGRAFI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI ERA TONOMI DAERAH

Potensi Sumber Daya Alam dan Penyerapan Tenaga Kerja

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberi keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam yang ada di daerahnya baik di wilayah laut, pesisir,

pertambangan dan energi, maupun sumber daya alam di bidang pertanian dan kehutanan. Kewenangan pengelolaan sumber daya alam seperti ini “bisa salah ditafsirkan” dengan dalih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pemanfaatan sumber daya alam dilakukan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kelestariannya.

Keraf (2006) mengemukakan lima tujuan desentralisasi, yang meliputi : *pertama*, desentralisasi dimaksudkan untuk lebih memperlancar dan memaksimalkan pelayanan publik demi menjamin kepentingan masyarakat secara lebih baik. Hal ini bisa dicapai karena pengambilan kebijakan lebih didekatkan pada rakyat, yaitu di daerah. *Kedua*, demi menjamin demokrasi. Terutama dimaksudkan disini adalah untuk memungkinkan partisipasi publik dalam setiap jenjang pengambilan keputusan dan kebijakan politik, dan mungkin kontrol serta pertanggung jawaban publik yang lebih baik.

Ketiga, kebijakan publikpun bisa lebih baik karena benar-benar bisa mengakomodasi aspirasi dan kepentingan rakyat setempat. Ini terutama terjadi, karena pemerintah yang mengambil keputusan tidak saja lebih mudah berkonsultasi dan berkomunikasi dengan masyarakat, melainkan juga mereka mengetahui secara langsung keadaan nyata di daerah tersebut. *Keempat*, otonomi daerah bertujuan untuk membuka peluang bagi jaminan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat. Dengan desentralisasi, peluang dan akses ekonomi dibuka bagi semua dan dimungkinkan disetiap daerah dan kelompok sosial untuk berperan aktif dalam

mengembangkan ekonominya. Serta *kelima*, desentralisasi membawa dampak positif berupa pemangkasan rentang birokrasi dan berarti mengurangi peluang untuk korupsi. Ini terjadi, tidak saja karena pelayanan publik semakin dekat dengan rakyat, tetapi juga karena kontrol yang meningkat dari rakyat terhadap kekuasaan birokrasi di daerah.

Sejak diberlakukannya regulasi tentang otonomi daerah, hampir semua daerah di Indonesia berlomba-lomba mengeksplotasi sumber daya alam di daerahnya. Bahkan tidak jarang saat ini kita temui sudah banyak kepala daerah yang melakukan promosi ke luar negeri untuk menggaet investor asing agar mau menginvestasikan dananya di daerah. Sektor yang menjadi primadona investor asing yaitu industri pertambangan mineral, batu bara, minyak dan gas bumi serta industri di bidang kehutanan dan perkebunan yang keberadaannya hampir merata mulai dari Pulau Sumatera sampai Papua.

Berbagai macam bahan tambang tersebar di seluruh wilayah Nusantara, dari sabang sampai merauke, mulai dari emas, timah, tembaga, perak, intan, batubara, minyak, bauksit, dan lain-lain. Berdasarkan data USGS, cadangan emas Indonesia berkisar 2,3% dari cadangan emas dunia. Dengan cadangan sebesar itu, Indonesia menduduki peringkat ke-7, sedangkan produksinya sekitar 6,7% dari produksi emas dunia dan menduduki peringkat ke-6. Daerah-daerah penghasil emas Indonesia di antaranya Bengkalis (Sumatra), Bolaang Mangondow (Sulawesi Utara), Cikotok (Jawa Barat), Logas (Riau), Meuleboh (Aceh), Reja

Lebong (Bengkulu), juga Lampung, Jambi, Kalimantan Barat, Papua, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Meskipun di awal tahun 2013 sampai 2015 situasi pasar di sektor pertambangan dan migas sedang mengalami penurunan sebagai dampak dari menurunnya harga komoditas di sektor ini. Akan tetapi di sektor lain seperti pertanian, industri pulp (kertas) dan kelapa sawit mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Komoditas perkebunan merupakan andalan bagi pendapatan nasional dan devisa negara, nilai ekspor komoditas perkebunan pada tahun 2013 total ekspor perkebunan mencapai USD 29,476 milyar atau setara dengan Rp. 353,713 triliun (asumsi 1 USD=Rp.12.000). Luas areal perkebunan seperti kelapa sawit juga mengalami peningkatan dari tahun 2013 seluas 10.465.020 Ha menjadi 11.444.808 Ha di tahun 2015. Pada tahun 2014 sektor pertanian menyerap sekitar 35,76 juta atau sekitar 30,2 % dari total tenaga kerja (Dirjen Perkebunan, 2014).

Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Menghadapai Bonus Demografi

Potensi sumber daya alam yang menjajikan serta maraknya investasi di daerah memberikan gambaran bahwa telah terjadi kompetisi di daerah dalam mengejar ketertinggalan. Kegiatan pengelolaan sumber daya alam di daerah sangat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah itu sendiri baik dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya maupun menciptakan lapangan kerja baru sehingga bisa mengurangi angka pengangguran di daerah.

Tabel 3. Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Pertanian Tahun 2010 – 2014

Tahun	Jenis Kelamin				Total	Pertumbuhan
	Laki-Laki	Pertumbuhan	Perempuan	Pertumbuhan		
2010	23.781.233	0,36	14.917.810	0,02	38.699.043	0,23
2011	22.482.257	5,46	14.059.715	5,75	36.541.972	5,57
2012	22.339.140	0,64	14.090.110	0,22	36.429.250	0,31
2013	22.095.252	1,09	13.952.948	0,97	36.048.200	1,05
2014	21.903.063	0,87	13.866.085	0,62	35.769.148	0,77
Rata-Rata 2010-2014	22.520.189	1,54	14.177.334	1,42	36.697.523	1,49

Sumber : Statistik Ketenagakerjaan Pertanian dalam Badan PPSDMP (2013)

Permasalahan utama ketenagakerjaan di sektor pertanian, yaitu keberadaan usia tenaga kerja produktif dan tingkat pendidikan. Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010, sebanyak 11,5% tenaga kerja di sektor pertanian sebagian besar merupakan tenaga kerja yang berusia antara 40 – 44 tahun dan disusul sebanyak 11,0% tenaga kerja kelompok usia 44 - 45 tahun. Dilihat dari sisi pendidikan, berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS tahun 2012, tenaga kerja di sektor pertanian yang tidak sekolah sampai yang tamat sekolah dasar mencapai 74,5%, disusul oleh lulusan sekolah menengah

pertama sebesar 15,7% dan lulusan sekolah menengah atas sebesar 9.15%.

Kondisi ini sangat timpang dengan ketenagakerjaan pada sektor industri pengolahan dan jasa. Pada sektor industri pengolahan sebagian besar tenaga kerja berlatar belakang pendidikan sekolah menengah atas dengan proporsi 14,8% dan pada berbagai sektor jasa sebagian besar tenaga kerja berlatar belakang pendidikan sekolah menengah atas dengan proporsi 33,4%. Ketimpangan ini yang menyebabkan perbedaan pendapatan rata-rata tenaga kerja di sektor pertanian dengan sektor industri pengolahan dan jasa.

Tabel 4. Tenaga Kerja di Sektor Pertanian Berdasarkan Tingkat Umur Tahun 2008 – 2012

Tahun	Umur Tenaga Kerja				Jumlah
	15-29 Tahun	30-44 Tahun	45-59 Tahun	> 60 Tahun	
2008	9.312.562	13.009.636	10.706.534	5.246.159	38.364.981
2009	9.273.128	13.062.569	10.871.778	5.402.522	38.609.997
2010	8.421.813	13.353.185	11.381.63	5.542.414	38.699.043
2011	8.416.895	12.782.136	10.484.742	4.858.199	36.541.972
2012	8.081.531	12.848.562	10.402.542	5.096.615	36.429.250
Rata-Rata Pertumbuhan	-3.41	-0.45	-0.61	-0.47	-1.25

Sumber : Statistik Ketenagakerjaan Pertanian dalam Badan PPSDMP (2013)

Selain data yang terdapat pada tabel 4, berdasarkan data BPS Tahun 2014, rata-rata pertumbuhan tenaga kerja di sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar 0.64% per tahun pada periode tahun 2005–2009, dan penurunan sebesar 1.49% per tahun antara tahun 2010 sampai tahun 2014. Penurunan pertumbuhan tenaga kerja terbesar justru pada kelompok umur pemuda, yaitu antara usia 15 sampai 29 tahun dengan rata-rata pengurangan 3.41% per tahun.

Laju pertumbuhan penduduk usia kerja di Indoensesia sebagaimana berdasarkan data yang telah dipaparkan sebelumnya tentang prediksi BPS dan UNDP (170,9 juta jiwa dan 187,6 juta jiwa), merupakan sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang sangat potensial. Tersedianya penduduk usia kerja dan produktif sangat membantu karena pemerintah daerah tidak perlu merekrut tenaga kerja dari luar. Akan tetapi hal ini bisa tercapai jika pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja ini juga disertai dengan adanya kebijakan pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan lapangan kerja yang produktif.

Berdasarkan data pada tabel 3 dan tabel 4, terjadi penurunan tenaga kerja usia muda dengan tingkat pendidikan menengah di sektor pertanian yang notabeneanya berada di daerah. Penduduk usia muda dengan tingkat pendidikan menengah ke atas lebih memilih untuk berkerja di sektor jasa. Sektor jasa merupakan salah satu sektor yang membutuhkan persaingan skill, keterampilan dan penguasaan teknologi yang tinggi. Dampaknya adalah jika kalah dalam

persaingan itu maka tidak ada pilihan lain bagi pekerja usia muda kecuali menjadi pengangguran.

Browning dan Crosseley (2001) dalam Ningrum (2013), menemukan bahwa keluarga yang memiliki anggota keluarga pada usia produktif, namun tidak bekerja (tidak sedang bersekolah), akan menurunkan konsumsi keluarga sebesar 16% dalam enam bulan ke depan. Sementara itu, bagi kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran kan langsung menurunkan konsumsi keluarga sebesar 24%. Dalam periode tidak mendapatkan penghasilan, keluarga akan menggunakan tabungan dan pinjaman untuk menghidupi keluarga. Dalam jangka panjang beban yang ditanggung bagi keluarga akan semakin tinggi. Hal ini menyebabkan daya beli masyarakat akan menurun, dan pembangunan suatu bangsa akan terhambat, khususnya Indonesia, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi. Oleh karena itu, pemerintah baik pusat maupun daerah sangat diharapkan untuk lebih serius melihat persoalan ini dengan menghasilkan kebijakan-kebijakan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia penduduk yang lebih baik lagi.

KESIMPULAN

Bonus demografi yang akan diterima bangsa kita pada tahun 2020 sampai tahun 2030 merupakan bagian tak terpisahkan dari laju pertumbuhan penduduk di Indonesia saat ini. Melimpahnya penduduk usia kerja di Indonesia merupakan suatu peluang bagi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di

tengah maraknya daerah dalam mengelola sumber daya alam. Pertumbuhan ekonomi akan tumbuh pesat dengan ketersediaan tenaga kerja usia muda yang disertai dengan tingkat produktifitas tinggi. Namun, hal ini bisa tercapai jika laju pertumbuhan penduduk usia muda ini juga diberengi dengan kebijakan stertegis dari pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Berbagai kebijakan terkait peningkatan sumber daya manusia penduduk usia muda masih belum efektif. Berdasarkan data yang diperoleh, minat penduduk usia muda untuk bekerja di sektor pertanian masing sangat kecil dan cenderung mengalami penurunan dengan alasan rendahnya pendapatan yang diterima.

SARAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian, makas dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diperlukan kebijakan-kebijakan strategis seperti program penigkatan nilai ekspor pertanian dengan akses lahan bagi penduduk usia muda, agrobisinis, ekowisata di pedesaan.
2. Penyediaan lapangan kerja harus mengarah pada sektor yang mampu menampung tingginya jumlah penduduk usia kerja disertai dengan distribusi yang merata sehingga dapat menghindari migrasi yang besar dari penduduk usia muda ke kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2014. Statistik Perkenunan Indonesia, 2013-2015. Jakarta: Kemeterian Pertanian Republik Indonesia
- Global Employment for Youth, 2013 ; A generation at risk. Geneva : International Labor Office.
- Keraf, A. Sonny. 2006. Etika Lingkungan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Ningrum, V. 2013. Tantangan Sosial Ekonomi Pengangguran Usia Muda di Indonesia. Jurnal Ilmiah Kependudukan Indonesia, Vol. 8 N0.2 Tahun 2013
- Realisasi Pendapatan Negara 2015. Kementerian Keuangan RepublikIndonesia
- Thornberry, T.P & Christenson, R.L. 1984. Unemployenment and Criminal Involvement : An Investigating of Reciprocal Casual Structures. American Sociological Review. 49.398-11.